

KEMENPANRB LAKUKAN PENDALAMAN MATERI UNTUK PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI BIG DI PPTRA



Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. RB dilaksanakan dalam

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, RB adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan RB yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB mencakup penilaian terhadap dua komponen yakni pengungkit (*enablers*) dan hasil (*results*). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab akibat antara komponen pengungkit dan komponen hasil dapat mewujudkan

proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan.

Metode penilaian PMPRB yang dilakukan adalah melakukan pendalaman materi ke unit teknis terkait, salah satunya adalah di Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas. Kepala Pusat PTR, Mulyanto Darmawan menyampaikan pelaksanaan RB pada area perubahan beserta capaian dan data dukungannya. Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nadimah, mengapresiasi proses pelaksanaan RB di lingkungan PPTRA. [Roswidyatmoko Dwihatmojo, 2018]



TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA, DAN ATLAS



CATATAN BERANDA

Menarik membaca laporan penasehat ekonomi bisnis Alpha beta untuk google bahwa teknologi geospasial telah memberikan *service* dan menghasilkan keuntungan ekonomi harian kepada konsumen perorangan dan perusahaan yang nilainya mencapai ratusan triliun perhari. Teknologi satelit telah menghasilkan data dan informasi geospasial (IG) yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pribadi maupun bisnis seperti monitoring kebakaran hutan, memetakan bencana, perencanaan tata ruang, hingga pencarian jalur tercepat dalam pengiriman barang. Sehingga data dan informasi geospasial sudah menyatu dalam kehidupan keseharian setiap orang. Laporan tersebut tentunya menumbuhkan kebanggaan bagi kita yang selama ini bergerak dalam bidang IG, walaupun sangat sulit untuk menghitung secara kuantitatif dampak ekonomi IG akibat adanya kebijakan gratis untuk data geospasial atau kebijakan berbagi pakai data.

Ini mungkin yang disebut sebagai *invisible power of geospasial*. Contohnya dalam penyusunan peta tata ruang, data dasar kita berikan tak berbayar/*free*, demikian pula data tematik bahkan supervisi dan asistensi agar penyusunan tata ruang cepat selesai. Dampaknya tentu jelas, setelah peta tata ruang tersedia maka ada kepastian hukum investasi bagi pelaku usaha dan pengambil keputusan, serta kepastian pengembangan wilayah yang memperhatikan aspek lingkungan yang memberikan keamanan bagi penduduk sekitar. Dampak ini terus terjadi selama 20 tahun mendatang, mengingat waktu berlakunya tata ruang adalah 20 tahun meski dapat direvisi satu kali dalam lima tahun.

Penghujung 2018, kami melaporkan bahwa kegiatan di PPTRA menghasilkan output berupa model (4 model), peta (70 peta tematik) dan laporan (12 buku). Data, peta, dan laporan yang dihasilkan tersebut merupakan dokumen penting yang dapat digunakan oleh berbagai pihak. Khusus tata ruang hampir 100% digunakan

oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengembangan wilayah, data lain relatif digunakan karena tidak langsung terkait dengan kebutuhan pembangunan daerah atau kepentingan perorangan. Untuk produk tersebut tentu memerlukan usaha aktif dari BIG dalam mengkampanyekan penggunaan data dan IG yang ada untuk mendukung bisnis mereka. Siapa yang pegang data maka akan pegang informasi, siapa yang pegang informasi akan menguasai pasar. Oleh karena itu tentunya dapat pula diilustrasikan dalam penerbitan *newsletter* ini pun bagian dari *service* informasi atas aktivitas pemetaan tata ruang, dinamika sumberdaya, dan atlas di BIG. Kamipun yakin akan memberikan efek bola salju untuk aktivitas lainnya. Inilah yang alhamdulillah kami syukuri walau mungkin tidak semua orang melihat muruah/kebaikan ke arah sana. Selamat membaca *newsletter* edisi November 2018. [Mulyanto Darmawan, 2018]

PROGRES ASISTENSI & SUPERVISI PETA TATA RUANG



Rapat Pleno RDTR Pantai Siung-Wediombo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2018-11-22



Rapat Pleno RDTR Sabailah Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah
2018-11-22



Rapat Pleno RTRW Kabupaten Blera Provinsi Jawa Tengah
2018-11-22



Rapat Pleno RTRW Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
2018-11-19



Rapat Pleno RDTR Cambaya Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan
2018-11-19



Rapat Pleno RTRW Provinsi Lampung
2018-11-19



Rekomendasi Peta RTR	RDTR	RTRW Kab/Kota	RTRW Provinsi	KSN	Total
Gorontalo	0	0	1	0	1
DIY	1	0	1	0	2
Jawa Barat	6	2	0	0	8
Sumatera Selatan	0	2	0	0	2
Jawa Timur	17	5	0	0	22
NTT	0	2	0	0	2
NTB	0	1	0	0	1
Lampung	0	0	1	0	1
Jawa Tengah	1	5	0	0	6
Sulawesi Barat	3	1	0	0	4
Sulawesi Selatan	8	0	0	0	8
Sulawesi Tenggara	1	0	0	0	1
Bali	2	0	0	0	2
Banten	2	2	0	0	4
Sumatera Barat	3	1	0	0	4
Kalimantan	0	0	0	1	1
Kalimantan Utara	1	0	0	0	1
Kalimantan Tengah	1	0	0	0	1
Bangka Belitung	1	0	0	0	1
Papua	6	0	0	0	6
Total	53	21	3	1	78

K

ISU STRATEGIS & INFO KEBIJAKAN

Informasi geospasial atau peta saat ini dianggap sesuatu yang “seksi” yang dapat menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi lembaga-lembaga yang selama ini “berhaluan” non geospasial. Menampilkan data berupa tabel, angka dan deskripsi dirasa sangat hambar dan kurang informatif tanpa disertai informasi terkait spasial atau keruangan. Informasi geospasial menjadi salah satu menu yang harus tersaji dalam sistem informasi potensi daerah, dimana sistem informasi ini akan menjadi ujung tombak promosi dan sosialisasi yang harus disampaikan pemerintah kepada dunia usaha (investor). Apalagi bagi kementerian/ lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal seperti BKPM

(Badan Koordinasi Penanaman Modal), yang semua itu berujung pada realisasi investasi. Semakin valid data yang disajikan dan dilengkapi dengan informasi spasial yang memadai, maka semakin besar peluang menarik investor baru.

Untuk menarik investasi di suatu wilayah maka perlu informasi tentang potensi suatu daerah yang dapat digambarkan melalui peta, tidak hanya sekadar deskripsi dan data tabular semata. Disamping itu, informasi geospasial juga berguna untuk memantau realisasi perusahaan-perusahaan yang telah diberikan ijin. Percuma saja ijin diberikan namun tidak direalisasikan sehingga tidak berakhir pada nilai investasi. Jenis informasi spasial yang diperlukan dalam menyampaikan potensi suatu daerah agar

membuahkan ketertarikan pada investor antara lain informasi terkait letak, posisi, arah, ukuran, kondisi geografis, dan kondisi sekitar obyek yang ingin dipasarkan termasuk infrastruktur dan fasilitas yang tersedia. Informasi spasial dapat ditampilkan berupa peta maupun citra yang dapat menggambarkan struktur keruangan yang komprehensif dari suatu obyek yang ingin “dijual” sehingga berpotensi menarik investor. Melalui dukungan dan nilai tambah menu informasi geospasial ini, diharapkan dapat memperkaya sistem informasi potensi daerah yang ada pada setiap Kabupaten/Kota. [Niendyawati, 2018].



Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
Fax - PPTRA : (021) 8764613
Email : redaksi.pttra@gmail.com
Twitter : @pptra_big
Instagram : @pptra_big
http://big.go.id/newsletter/

REDAKSI:

| Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Tim Redaksi: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |
| Editor: Mulyanto Darmawan, Fakhruddin Mustofa , Sri Eka Wati, Roswidyatmoko D., Randhi Atiqi, Chintia Dewi |
| Desain Tata Letak: Ika Rosalika |

Supervisi Administrasi dan Teknis Kegiatan Kontraktual Pemodelan Dinamika Spasial Kawasan Bandar Kayangan dan Pemodelan Spasial KSPN Mandalika

Pada tahun 2018 terdapat lima kegiatan kontraktual di Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya. Kegiatan tersebut meliputi Pemetaan Integrasi Neraca Sumberdaya DAS Ciliwung dan DAS Cisadane, Pemodelan Dinamika Spasial KSPN Mandalika, Kegiatan Pemodelan Dinamika Spasial KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, Kegiatan Pemodelan Dinamika Spasial KEK Sorong, dan Kegiatan Pemodelan Dinamika Spasial Kawasan Bandar Kayangan. Tiga kegiatan kontraktual tersebut berakhir pada tanggal 19 November 2018, sedangkan 2 kegiatan berakhir pada bulan Desember 2018.

Dalam rangka menjaga kualitas pekerjaan yang dihasilkan dan mengawal administrasi pertanggungjawaban maka pada tanggal 13 November 2018 telah dilaksanakan supervisi teknis dan administrasi di Hotel Olympic Renotel, Sentul, Bogor. Supervisi administrasi dan teknis dilakukan untuk kegiatan Pemodelan Dinamika Spasial KSPN Mandalika dan Kegiatan Pemodelan Dinamika Spasial Kawasan Bandar Kayangan, karena kedua kegiatan tersebut berakhir pada tanggal 19 November 2019. Dalam hal ini pelaksana kegiatan adalah PT Web GIS Indonesia dan PT Geospasial Info Dinamika. Supervisi tersebut mengundang semua tenaga ahli termasuk tenaga administrasi dari pihak penyedia jasa. Berbeda dengan supervisi sebelumnya, kali ini supervisi dilakukan lebih lama guna membahas secara menyeluruh tentang kemajuan pengerjaan serta pemberian solusi terkait kendala yang dihadapi dari sisi teknis maupun administrasi. Selain itu dilakukan pula pengecekan terhadap kesiapan administrasi untuk menarik Termin 2 dan Termin Terakhir.

Dari sisi administrasi terdapat beberapa point yang segera ditindak lanjuti oleh pelaksana kegiatan yaitu perlu segera memperbaiki dokumen ad-cost dan penagihan untuk termin 3 dilakukan sesuai bukti.Secara teknis

kegiatan pemodelan Dinamika Spasial Kawasan Bandar Kayangan memiliki kendala pada model spasial dinamis. Pada model spasial dinamis perlu dilakukan pemilihan terhadap driving factor, karena driving faktor yang digunakan masih terlalu banyak (25 driving factor) tetapi hasil simulasi penutup lahan pada tahun 2016 masih belum menunjukan adanya kemiripan dengan eksisting penutup lahan tahun 2016. Untuk itu akan dilakukan pengolah lagi dengan menggunakan 16 driving factor terpilih.

Kegiatan Pemodelan dinamika spasial KEK Mandalika sudah berada di tahap akhir pelaksanaannya. Setelah pada tanggal 5 November 2018 dilakukan workshop hasil kegiatan maka pada supervisi kali ini diisi dengan pengecekan apakah masukkan dari pihak terkait sudah diimplementasikan dalam pemodelannya. Salah satu yang menjadi kendala dalam pemodelan KEK Mandalika ini adalah belum terintegrasinya antara sistem dinamis dengan spasial dinamis. Belum integrasinya kedua sistem tersebut akibat dari kesalahan pada saat melakukan perubahan tabel pada sistem dinamisnya. Terkait dengan masukkan saat workshop yaitu penambahan subsistem kebutuhan infrastruktur sudah dilakukan, namun masih terdapat beberapa kesalahan dalam menentukan asumsi pemodelannya. Dari sisi administrasinya tidak ditemukan kendala berarti sehingga sudah siap diajukan untuk penarikan termin ke 2.

Di akhir supervisi diberikan beberapa solusi mengenai penyelesaian integrasi antara sistem dinamis dan spasial. Disampaikan juga saran serta masukkan untuk subsistem pariwisata dan infrastruktur air bersih berupa asumsi-asumsi dasar yang lebih logis untuk dipakai dalam pemodelan. Supervisi ditutup dengan pemaparan akhir dari penyedia jasa terkait rencana perbaikan pemodelan dan penyelesaian laporan akhir serta kertas kerja skenario pemodelannya. [Setiyani dan I Made Dipta Sudana, 2018]

PELATIHAN SOFTWARE HIDRODINAMIK DELTARES

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas ikut berpartisipasi dalam Pelatihan *Software* Hidrodinamika yang diselenggarakan oleh Deltares bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pelatihan dibuka oleh Kepala Balai Litbang Hidrologi dan Tata Air, Pusat Pengembangan dan Penelitian Sumber Daya Air (PUSAIR). Drs. Irfan Sudono, M.T, pada Kamis September 2018 di Hotel Gran Mercure, Yogyakarta.

Kepala PUSAIR mengatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia adalah ketersediaan data dan rumitnya metode-metode perhitungannya. melalui penyelenggaraan acara ini, diharapkan ada pengetahuan baru dari Deltares selaku lembaga riset di Belanda yang mengembangkan berbagai macam *software* hidrologi untuk memberikan dan berbagi pengetahuan mengenai *software* untuk melakukan analisa hidrologi secara otomatis. Diharapkan data-data dan analisis yang dihasilkan mampu berkesinambungan dan menghasilkan analisis yang berguna bagi kepentingan multi sektoral.

Pelatihan diisi pengenalan dan aplikasi *Software* Delft FEWS oleh Mr Arnejan Van Loenen selaku wakil dari Deltares. *Software* ini berfungsi

untuk melakukan perhitungan dan prediksi curah hujan sebagai input untuk pemodelan banjir. Apabila curah hujan yang datang melebihi standar yang ditetapkan maka *software* ini akan memberikan rekomendasi untuk memberikan respon secepatnya terhadap kejadian tersebut. Lokasi yang diambil untuk pelatihan ini adalah kasus banjir DKI Jakarta. Banjir Jakarta umumnya pada bulan Desember s/d Februari. Kejadian banjir disebabkan karena hujan yang terjadi secara berturut-turut sehingga kondisi tanah telah mengalami jenuh. Banjir di Jakarta umumnya karena hujan yang merata di seluruh DAS Jakarta, namun dapat juga terjadi karena hujan di hulu tetapi tidak memberikan dampak yang terlalu buruk bila tidak disertai dengan hujan lokal di Jakarta.

Serangkaian acara pelatihan yang berlangsung selama tiga hari ini diharapkan dapat memberikan input dan masukan kepada PPTRA, khususnya bidang pemetaan dinamika sumberdaya yang melakukan perhitungan neraca air. Acara ini memberi wawasan bahwasanya terdapat berbagai macam *software* dan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan perhitungan sumberdaya air dan mampu untuk berintegrasi dengan informasi geospasial sehingga analisis yang dikeluarkan mampu menjawab kebutuhan multisektoral. [Andika Bangun Taji, 2018]

CSRT Dukung Pemetaan Kemiskinan

Angka kemiskinan nasional telah turun mencapai 9,82%. Sebuah angka yang tercatat pertama kali persentase kemiskinan berada di bawah 1 digit. Di satu sisi cukup menggembirakan sebagai salah satu indikator keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan. Di sisi lain perlu diupayakan data tentang dimana keberadaan penduduk yang masuk dalam angka 9,82% tersebut. Salah satu aktivitas untuk mempercepat pendataan kemiskinan adalah pemanfaatan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) untuk mendukung pemetaan kemiskinan. CSRT yang terintegrasi dengan survei lapangan menghasilkan data sebaran penduduk miskin, pola permukimannya, dan asosiasi keberadaannya dikaitkan dengan sumberdaya lahan setempat.

Keterangan diatas merupakan salah satu hasil penting dalam FGD Pemetaan Sosial dalam Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan yang terlaksana tanggal 8 November 2018 di Bandung. FGD diikuti oleh Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 5 kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Tim Teknis PT Shiddiq Sarana Mulya, dan Tim Teknis Atlas dan Pemetaan Sosial. FGD dibuka oleh Kapus PPTRA, Mulyanto Darmawan. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa pemetaan sosial untuk mendukung pengentasan kemiskinan merupakan upaya BIG dalam membantu pritoritas nasional penanggulangan kemiskinan.

OPD menyambut baik draft hasil pemetaan dan kajian yang dilakukan BIG. Pihak daerah melalui OPD menyatakan bahwa hasil ini menjadi salah satu masukan penting dalam pmutakhiran data mandiri yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebagai informasi, data terakhir tentang kemiskinan berupa Basis Data Terpadu tercatat pada tahun 2015. Setelah data tersebut keluar, diperlukan updating secara mandiri oleh pemerintah kabupaten/kota. [Fakhruddin Mustofa, 2018].



Peserta FGD

Workshop Pemodelan Dinamika Spasial Kawasan Bandar Kayangan



Peserta Worksoft

kawasan strategis nasional yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan yang mampu mendorong pengembangan wilayah di sekitarnya. Peraturan tersebut menetapkan Kawasan Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai kawasan andalan nasional untuk kegiatan industri, perdagangan, jasa dan kelautan. Terdiri atas pelabuhan yang dilengkapi kota metropolitan dengan industri dan kilang minyak. Bandar Kayangan memiliki letak yang sangat strategis dan berpeluang dikembangkan menjadi “*International Global Hub Port*”.

Pemodelan dinamika spasial mensimulasikan perubahan lahan berdasarkan faktor-faktor penyebab / *driving factor*, yang konstelasinya diformulasikan dalam beberapa skenario, dan menduga dampak perubahan lahan tersebut, baik pada indikator sosial-ekonomi maupun lingkungan. Simulasi perubahan lahan mencakup wilayah Kawasan Bandar Kayangan maupun diluar wilayah Bandar Kayangan. Pengembangan skenario menggunakan 4 variabel kunci, meliputi: ekonomi, lahan, lingkungan, dan kesejahteraan. Variabel ekonomi

Workshop Model Dinamika Spasial Kawasan Bandar Kayangan bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan dan menjaring berbagai masukan serta arahan yang terkait. Dalam PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah memuat kawasan andalan maupun

yang digunakan yaitu investasi 17 sektor ekonomi di Kabupaten Lombok Utara, realisasi investasi pengembangan Kawasan Bandar Kayangan per sektor, dan Target Produk Domestik Regional Bruto. Pengembangan skenario dengan variabel lahan menggunakan daya dukung lahan berdasarkan tren historis dan daya dukung lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sebagai *ultimate goals* dari pengembangan kawasan ini adalah menuju *high income city port* dan menuju kota metropolitan. Diperkirakan pembangunan kawasan Bandar Kayangan pada akhir 10 tahun pertama (2019-2029), PDRB akan mencapai 103 T Rupiah, atau mendekati tingkat yang sama dengan Kota Palembang saat ini. Sedangkan pada akhir 10 tahun kedua (2029-2039), PDRB akan mencapai 380 T Rupiah, atau mendekati PDRB Kota Surabaya saat ini. Dalam kurun waktu 20 tahun masa konstruksi, diperkirakan akan menyerap tenaga kerja lebih dari 700.000 jiwa, serta terjadi pergerakan imigrasi ke Lombok Utara pada akhir konstruksi 2039 menjadi 1,65 juta jiwa.

Workshop dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2018 yang dihadiri oleh Deputi Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial, Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas, Kepala PPTRA, PT Bandar Kayangan Internasional, Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya dan Staf Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya, PPTRA. Terdapat beberapa masukan yang diperoleh dari narasumber, diantaranya bagaimana melihat dampak keterkaitan ekonomi pengembangan Kawasan Bandar Kayangan terhadap Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Pulau Lombok, maupun secara nasional. [Setiyani, 2018]

Masyarakat Sarmi Dikenalkan Pemanfaatan Peta untuk Mendukung Pembangunan Daerah



Peserta Sosialisasi

BIG diwakili PPTRA bersama mitra kerja dari Komisi VII DPR-RI melakukan lawatan ke Kabupaten Sarmi – Provinsi Papua untuk melaksanakan diseminasi pemanfaatan informasi geospasial (13/11/2018). Anggota DPR-RI yang hadir, Peggi Patrisia Patipi, berasal dari daerah pemilihan Provinsi Papua. Peserta diseminasi terdiri dari kepala suku, pemuka agama, petani, guru, dan masyarakat biasa yang kebanyakan berasal dari Distrik Sarmi.

Masyarakat diberikan penjelasan tentang pemanfaatan peta untuk mendukung pembangunan daerah secara akurat. Melalui peta dapat diketahui karakteristik geografis dan persebaran potensi sumber daya di suatu daerah. Berdasarkan peta tersebut, lokasi pembangunan yang sesuai dapat ditentukan melalui perencanaan yang tepat.

Selain berbasis potensi sumber daya, perencanaan pembangunan perlu memperhatikan potensi bencana alam. Dr. Priyadi Kardono yang hadir sebagai pemateri menjelaskan, Kabupaten Sarmi masuk ke dalam daerah rawan bencana gempa dan tsunami. Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sarmi harus memperhatikan lokasi dan kualitas

bangunan agar dapat bertahan saat terjadi gempa dan tsunami.

Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kesadaran terhadap potensi bencana alam terutama bagi yang bermukim di lokasi rawan. Selain mempelajari tanda-tanda alam, jalur evakuasi dan titik kumpul saat terjadi bencana perlu direncanakan dengan matang. Priyadi menjelaskan, idealnya setiap keluarga memiliki rencana tentang apa yang harus dilakukan dan di mana akan berkumpul saat terjadi bencana. Dengan demikian, saat gempa atau tsunami terjadi di jam kerja, setiap anggota keluarga dapat mengevakuasi diri dari tempatnya beraktivitas langsung menuju ke lokasi yang aman. “*Jika di saat-saat genting kita saling mencari ke rumah, kita bisa-bisa kehabisan waktu dan tidak selamat*”, tegasnya.

Masyarakat juga diberikan wawasan tentang wilayah NKRI untuk menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. Peserta diajak untuk membandingkan wilayah NKRI yang luas dengan negara-negara lain di dunia menggunakan peta. Dalam konteks lokal, masyarakat dikenalkan wilayahnya sendiri yaitu Provinsi Papua sebagai provinsi terluas di Indonesia. Wilayah kabupaten Sarmi sendiri juga digambarkan mengungguli luas wilayah beberapa negara lain di dunia. Dalam kesempatan ini, peta wilayah NKRI dan peta wilayah Provinsi Papua diserahkan sebagai cendera mata oleh Inspektur BIG kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi yang turut hadir dalam acara tersebut.[Randhi Atiqi, 2018]

RESENSI BUKU

WARISAN GEOLOGI KRAKATAU PEMBENTUK AKHIR SELAT SUNDA

Keunikan Kompleks Gunung Krakatau terungkap lewat data kegeologian yang telah ditemukan beserta catatan-catatan sejarah yang ada. Dari hal tersebut, diketahui bahwa rangkaian letusan supervulkano Gunung Krakatau menjadi pemicu penting dari terbentuknya Selat Sunda yang memisahkan Pulau Sumatera dan Jawa. Buku ini hadir untuk membantu memberikan gambaran terhadap masyarakat disekitar Gunung Krakatau dan wilayah sekitarnya akan dampak jejak letusan dahsyat Krakatau. Selain itu, buku ini juga menuntun kita untuk melakukan upaya-upaya antisipasi terhadap potensi letusan Krakatau melalui kegiatan geowisata sebagai salah satu upaya mitigasi bencana.

Pada bagian awal, buku ini membahas mengenai pengenalan terhadap warisan geologi, pemaknaan konservasi geologi, pengembangan geowisata, serta tentang geologi Selat Sunda. Selanjutnya, dibahas pula mengenai jejak supervulkano Krakatau serta Geowisata disekitar wilayah Gunung Krakatau. Pada bagian akhir membahas mengenai mitigasi bencana erupsi, khususnya Gunung Anakkrakatau, serta teori mengenai pengenalan dan sistem pengembangan Geopark.

Beberapa hal ilmiah yang disampaikan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi *stakeholders* pemerhati lingkungan dan kepariwisataan untuk mendorong pentingnya konservasi warisan geologi dan pemanfaatannya. Selain itu, buku ini dapat menjadi rintisan penting menjadikan Gunung Kratakatau sebagai geopark yang bisa meningkatkan kunjungan wisata ke Indonesia serta meningkatkan perekonomian nasional, khususnya masyarakat Lampung dan Banten. [Adinda Cempaka, 2018]



Penulis : Oki Oktariadi
Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan,
Badan Geologi, Kementerian ESDM
xii + 304 Halaman